

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI
UMUM (DAU), DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP
TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH
Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2018-2022**

Muhammad Zidan Fadillah Yulkhaq
Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
21zidanfadillah@gmail.com;

J. B. Amiranto
Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
jb65amiranto@gmail.com;

ABSTRACT

Regional autonomy is the authority of an autonomous region to regulate and manage the interests of the local community according to its own initiative based on community aspirations in accordance with statutory regulations (Suparmoko, 2002). The aim of regional autonomy is to make regions more independent so that they can act on their own without assistance from the central government. Regional governments must have funds originating from their own revenues to carry out regional development and financing. This research is quantitative research which obtains data from <https://djpk.kemenkeu.go.id/>. This research aims to determine the effect of local original income, general allocation funds and special allocation funds on the level of regional financial independence.

Keywords: *Regional Original Income, General Allocation Funds, Special Allocation Funds, Level of Regional Financial Independence*

ABSTRAK

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Suparmoko, 2002). Tujuan Otonomi daerah adalah untuk membuat daerah menjadi lebih mandiri sehingga mereka dapat bertindak sendiri tanpa bantuan dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah harus memiliki dana yang berasal dari pendapatan mereka sendiri untuk melaksanakan pembangunan dan pembiayaan daerah. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang mana mendapatkan data dari <https://djpk.kemenkeu.go.id/>. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Kata Kunci: *Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah*

A. PENDAHULUAN

Kemandirian daerah diharapkan bisa dicapai melalui otonomi daerah, karena pemerintah pusat jelas tahu bahwa yang paling tahu tentang kondisi daerah adalah pemerintah daerah sendiri, baik dari masalah yang ada hingga sumber pendapatan yang dapat mereka peroleh. Kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan belanjanya akan meningkat jika mereka dapat meningkatkan pendapatannya. Otonomi daerah bertujuan untuk menjaga kemandirian keuangan daerah ini. Dengan otonomi daerah, diharapkan setiap daerah dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Begitu pula dengan keuangan daerah, otonomi daerah diharapkan memungkinkan setiap daerah untuk menjalankan keuangan mereka sendiri.

Namun terdapat kendala dalam implementasi otonomi daerah, yaitu adanya kesenjangan fiskal antar daerah. Pemerintah daerah menerima bantuan (transfer) dari pemerintah pusat, salah satunya dengan memberikan dana alokasi umum. Namun, kenyataannya menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum dapat sepenuhnya independen dari pemerintah pusat dalam mengatur rumah tangga daerah. Ini ditunjukkan dengan ketergantungan yang lebih besar pada dana alokasi umum daripada pendapatan asli daerah untuk membiayai belanja daerah.

Menurut penelitian Sri Ayem (2018), yang berjudul Pengaruh Pertumbuhan Ekonom, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Di Provinsi DIY Yogyakarta Tahun 2011-2016. Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Secara serentak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Namun secara parsial hanya variabel pertumbuhan ekonomi yang memiliki pengaruh terhadap belanja modal.

Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah adalah pendapatan asli daerah. Jika pendapatan asli daerah meningkat, tingkat kemandirian keuangan daerah juga meningkat, sebaliknya jika pendapatan asli daerah rendah, tingkat kemandirian keuangan daerah juga rendah. Selain itu, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus juga mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah. Jika dana alokasi umum meningkat, tingkat kemandirian keuangan daerah juga menurun. Jika dana alokasi khusus meningkat maka tingkat kemandirian keuangan daerah juga menurun, begitu sebaliknya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah gabungan dari pos penerimaan pajak yang mencakup pajak dan retribusi daerah, serta pos penerimaan non pajak yang mencakup investasi dan pendapatan pengelolaan sumber daya alam serta hasil perusahaan milik daerah. Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut Pasal 1 Ayat 48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk menopang mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Rumusan masalah pada penelitian ini pertama, Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan daerah pada

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2022; kedua Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2022; ketiga, Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2022.

Tujuan penulisan ini pertama, mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2022; kedua, mengetahui pengaruh dana alokasi umum terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2022; ketiga, mengetahui pengaruh dana alokasi khusus terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2022.

Peneliti ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut: pertama, Manfaat Teoritis dapat digunakan sebagai bahan referensi khususnya untuk pengkajian topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori, terutama yang berkaitan dengan sektor public; kedua, manfaat Praktis bagi pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pentingnya mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki daerah untuk peningkatan kualitas pelayanan publik demi kemajuan daerah, memberikan informasi kepada pihak-pihak terkait yang memerlukan hasil penelitian ini.

B. PENELITIAN TERDAHULU DAN KONSEP

Pada penelitian Safiul Huda (2019) dengan judul “Pengaruh PAD, DAU, dan DAK Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah 2014-2016” menjelaskan bahwa Secara parsial Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap belanja modal sedangkan Dana Alokasi Khusus tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal. Namun secara simultan hasil pengujian membuktikan bahwa ketiga variabel yaitu PAD, DAU, DAK secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap belanja modal. Dan penelitian yang dilakukan oleh Sri Ayem (2018) yang berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonom, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Di Provinsi DIY Yogyakarta” mendapatkan hasil bahwa Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Secara serentak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Namun secara parsial hanya variabel pertumbuhan ekonomi yang memiliki pengaruh terhadap belanja modal

Akutansi Sektor Publik

Menurut Mardiasmo (2018), merupakan suatu alat informasi sebagai penyedia informasi akuntabilitas dan pengendalian manajemen bagi pemerintah maupun publik. Menurut *American Accounting Assocation* (1970), bertujuan untuk memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi secara tepat, efisien, dan ekonomi; serta untuk memberikan informasi yang memungkinkan pelaporan

pelaksanaan tanggung jawab manajer dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenang manajer secara tepat dan efisien, dan memungkinkan pelaksanaan akuntansi sektor publik secara efektif dan efisien.

Pendapatan Asli Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah uang yang diterima oleh pemerintah daerah dan dibayar sesuai dengan undang-undang yang mengatur PAD, termasuk pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan Asli Desa berfungsi sebagai sumber pendapatan yang mendukung pembangunan daerah, seperti pembangunan infrastruktur. PAD juga menunjukkan kemampuan daerah untuk menggali sumber daya. Karena Pendapatan Asli Daerah membentuk dasar pembiayaan pemerintah daerah, kapasitas untuk melaksanakan ekonomi ditentukan oleh seberapa besar kontribusi yang dapat diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD).

Sumber-sumber PAD

Berdasarkan pasal 157 UU No. 23 Tahun 2014 PAD bersumber dari: pertama, pajak daerah; kedua, retribusi daerah; ketiga, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; keempat, lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dana Alokasi Umum

Menurut Damas Dwi Anggoro (2017:24), Dana Alokasi Umum didefinisikan sebagai "pendapatan yang diperoleh dari alokasi APBN untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah. Alokasi DAU merupakan pelaksanaan prinsip desentralisasi dalam otonomi daerah." Sebaliknya, Rachim (2016:97) menjelaskan Dana Alokasi Umum sebagai berikut: "Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Indikator DAU

Adapun ketentuan dalam menetapkan DAU menurut ketentuan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan adalah sebagai berikut: pertama, dana alokasi umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN; kedua, dana alokasi umum (DAU) untuk daerah propinsi dan untuk Kabupaten/Kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari dana alokasi umum sebagaimana ditetapkan diatas; ketiga, dana alokasi umum (DAU) untuk suatu Kabupaten/Kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah Dana Alokasi Umum untuk Kabupaten/Kota yang ditetapkan APBN dengan porsi Kabupaten/Kota yang bersangkutan; keempat, porsi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud di atas merupakan proporsi bobot Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Dana Alokasi Khusus

Menurut Pasal 1 Ayat 48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk

menopang mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah, dana alokasi khusus didefinisikan sebagai dana yang dialokasikan untuk kegiatan khusus. Siregar (2017) menyatakan bahwa dana transfer khusus, juga dikenal sebagai dana alokasi khusus, terdiri dari dua kategori: dana alokasi khusus fisik dan dana alokasi khusus non-fisik.

Dana Alokasi Khusus Fisik

Berdasarkan PMK Nomor 130/PMK.07/2019 tentang pengelolaan dana alokasi khusus fisik pasal 1 ayat 8 menyatakan bahwa Dana Alokasi khusus Fisik (DAK Fisik) artinya dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai aktivitas khusus fisik yang merupakan urusan wilayah yang sesuai dengan prioritas nasional.

Dana Alokasi Khusus Non-Fisik

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik, DAK Non Fisik adalah dana bantuan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang dimasukkan ke dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Fokus utama dari DAK Non Fisik adalah memberikan dukungan untuk pendanaan kegiatan khusus non-fisik yang merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dan selaras dengan prioritas nasional.

Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Wike dan Halmawati (2020), kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah yang ada di daerah untuk membiayai sendiri operasi pemerintahan, pertanggungjawaban, dan pembangunan serta layanan yang diberikan kepada masyarakat setelah membayar pajak dan retribusi, yang merupakan sumber pendapatan yang sangat dibutuhkan oleh daerah. Menurut Halim (2007:232) kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi dan pinjaman}}$$

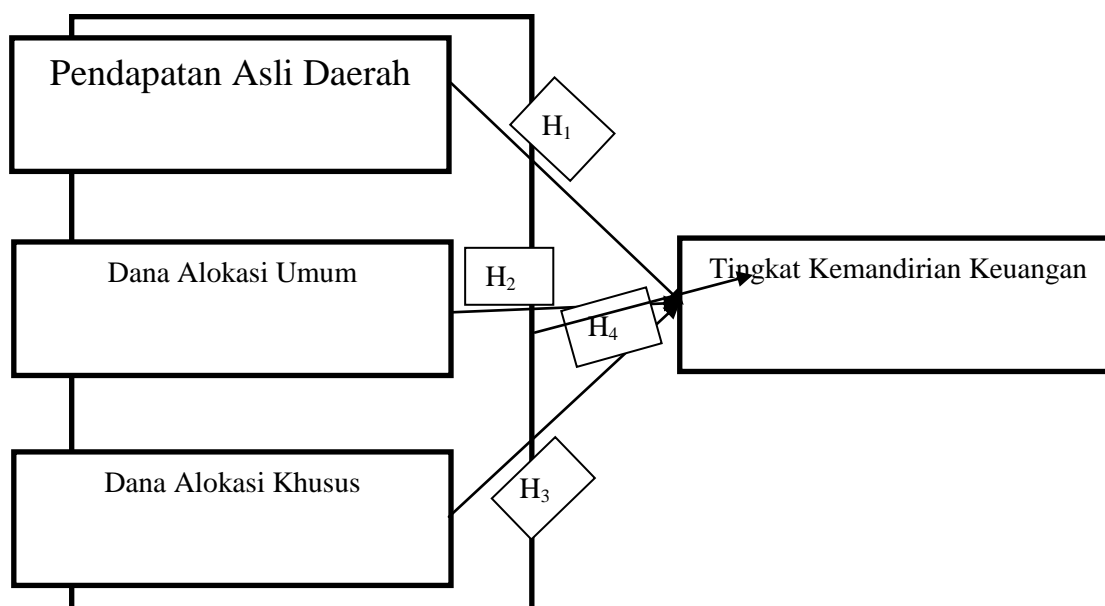
Menurut Sidik dalam Wirawan (2007) dengan PAD yang meningkat, diharapkan tingkat kemandirian keuangan daerah akan meningkat. Tingkat kemandirian ini ditunjukkan dengan kontribusi PAD untuk mendanai belanja daerah. Hasil penelitian Erysyad (2011) dan Muliana (2009) menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Jika PAD meningkat maka kemandirian keuangan daerah juga meningkat, sebaliknya jika PAD rendah maka kemandirian keuangan daerah juga rendah.

Menurut Sidik (2004), pemerintah pusat harus memberikan DAU yang lebih besar kepada daerah dengan kemampuan yang lebih kecil, tetapi daerah dengan kemampuan yang lebih kecil akan menerima DAU yang lebih besar. Dengan kata

lain, jika pemerintah pusat memberikan DAU yang lebih besar kepada daerah dengan kemampuan yang lebih kecil, maka daerah tersebut akan kurang mandiri. Ini mungkin karena PAD daerah tersebut kecil, sehingga pemerintah pusat harus memberikan DAU yang lebih kecil kepada daerah dengan kemampuan.

Menurut Yani (2002), Dana Alokasi Khusus (DAK) dimaksudkan untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi tanggung jawab daerah dan merupakan prioritas nasional. Dengan kata lain, jika DAK yang dialokasikan pemerintah pusat relatif besar, daerah tersebut belum mandiri secara fiskal.

Kerangka Berfikir



Hipotesa Penelitian

Berlandaskan pada kajian teori serta penelitian yang relevan yang sudah dikemukakan, sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H₁: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur.
- H₂: Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur.
- H₃: Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur.
- H₄: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus secara bersama terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur.

C. METODE PENULISAN

Penulis hendak mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK) terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah studi kasus pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2018-2022. Penelitian ini banyak menggunakan angka dan

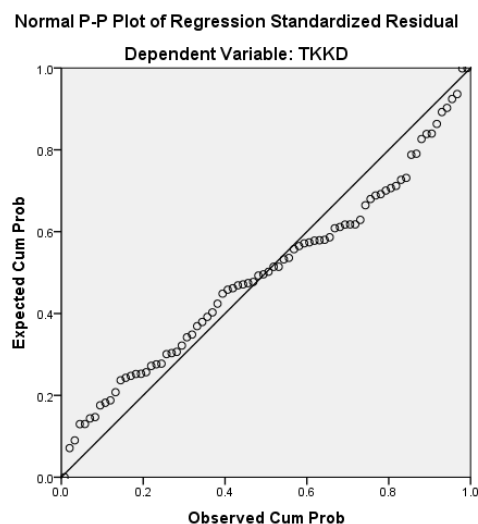
menggunakan statistik, jadi termasuk dalam kategori penelitian kuantitatif. Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder berupa Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja (APBD) di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur data Tahun 2018–2022. Peneliti mengambil 16 sampel yaitu: Kab. Lamongan, Kab. Sampang, Kab. Madiun, Kab. Sidoarjo, Kab. Malang, Kab. Situbondo, Kab. Mojokerto, Kab. Trenggalek, Kab. Nganjuk, Kab. Pamekasan, Kab. Pasuruan, Kab. Ponorogo, Kota Tuban, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Surabaya yang mana atas dasar pertimbangan peneliti sendiri. Peneliti menggunakan metode pengolahan data berupa analisis statistik deskriptif yang mana teknik yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menunjukkan topik penelitian melalui data sampel atau populasi. Untuk statistik deskripsi menggunakan nilai minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Provinsi Jawa Timur secara geografis terletak di antara 11100 Bujur Timur – 11404’ Bujur Timur dan 70 12’Lintang Selatan – 8048”Lintang Selatan , dengan luas wilayah sebesar 47.963 km² yang meliputi dua bagian utama. Yaitu Jawa Timur daratan dan Kepulauan Madura. Wilayah daratan Jawa Timur sebesar 88,70 persen atau 42.541 km², sementara luas Kepulauan Madura memiliki luas 11.30 persen atau sebesar 5.422 km². Jumlah penduduknya pada tahun 2010 mencapai 37.476.757 jiwa . (Sumber : Database BPS Tahun 2010). Secara administratif Jawa Timur terbagi menjadi 29 kabupaten dan 9 kota, dengan Kota Surabaya sebagai ibukota provinsi. Ini menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi yang memiliki jumlah kabupaten/kota terbanyak di Indonesia. Jawa Timur berbatasan dengan beberapa wilayah di Indonesia. Di bagian utara, Jawa Timur berbatasan dengan Laut Jawa. Lalu di bagian timur, Jawa Timur berbatasan dengan Selat Bali. Di bagian selatan, Jawa Timur berbatasan dengan Samudra Hindia. Sedangkan di bagian barat, Jawa Timur berbatasan dengan Jawa Tengah. Berdasarkan data dari Sensus Penduduk Indonesia 2010, berikut ini komposisi etnis atau suku bangsa di provinsi Jawa Timur

| No | Suku | Jumlah Penduduk tahun 2010 | % |
|----|----------------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | Jawa | 30.019.156 | 80% |
| 2 | Madura | 6.520.403 | 17.53% |
| 3 | Tionghoa | 244.393 | 0,65% |
| 4 | Batak | 56.339 | 0,15% |
| 5 | Sunda | 46.223 | 0,12% |
| 6 | Asal Nusa Tenggara Timur | 31.272 | 0,08% |
| 7 | Lampung | 28.515 | 0,08% |
| 8 | Bugis | 20.753 | 0,06% |
| 9 | Bali | 20.363 | 0,06% |
| 10 | Asal Maluku | 17.756 | 0,04% |
| 11 | Asal Papua | 16.100 | 0,04% |
| 12 | Warga Asing | 29.442 | 0,08% |
| 13 | Suku lainnya | 154.333 | 0,41% |
| | Provinsi Jawa Timur | 37.205.052 | 100% |

**Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas**



Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa sebaran data mengikuti arah garis dan berada disekitar garis diagonal. Hal ini sesuai dengan asumsi normalitas data dalam model regresi, sehingga data dalam penelitian ini dinyatakan berdistribusi normal dan dapat digunakan dalam model regresi.

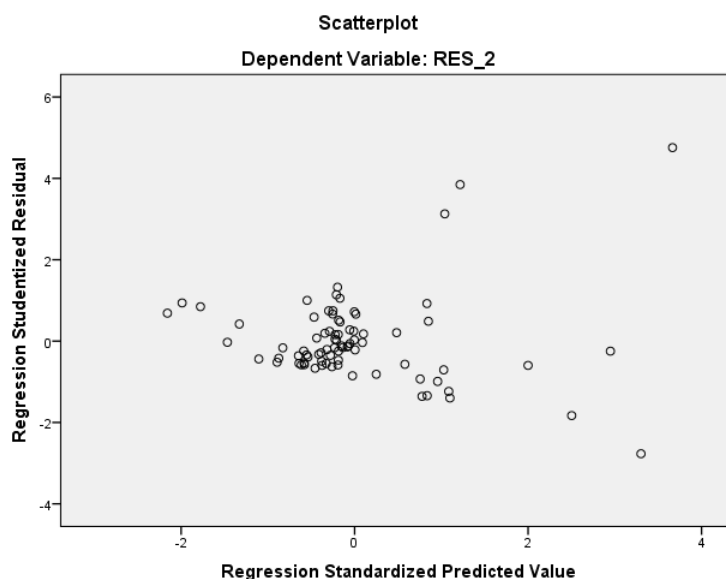
**Uji Multikolinieritas
Coefficients^a**

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. | Collinearity Statistics | |
|-------------|-----------------------------|------------|---------------------------|----------|------|-------------------------|-------|
| | B | Std. Error | Beta | | | Tolerance | VIF |
| 1(Constant) | .431 | .027 | | 16.161 | .000 | | |
| PAD | .001 | .000 | .007 | 121.672 | .000 | .811 | 1.233 |
| DAU | .000 | .000 | -.001 | -8.260 | .000 | .294 | 3.407 |
| DAK | 1.000 | .000 | .997 | 9557.533 | .000 | .282 | 3.550 |

a. Dependent Variable: TKKD

Dari tabel diatas dapat disimpulkan variabel X1 nilai tolerance 0,811 > 0,05 dan VIF 1,233 < 5, variabel X2 nilai tolerance 0,294 > 0,05 dan VIF 3,407 < 5, Variabel X3 nilai tolerance 0,282 > 0,5 dan VIF 3,550 < 5, maka dapat disimpulkan bahwa dari ketiga variabel tidak terjadi multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas



Hasil dari uji heteroskedastisitas grafik scatterplot memperlihatkan bahwa titik-titik menyebar secara baik diatas maupun dibawah pada angkat 0 pada sumbu Y. Artinya tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi sehingga model regresi layak dipakai

Uji Hipotesis

Uji Partial

Coefficients^a

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|-------------|-----------------------------|------------|---------------------------|----------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| 1(Constant) | .431 | .027 | | 16.161 | .000 |
| PAD | .001 | .000 | .007 | 121.672 | .000 |
| DAU | .000 | .000 | -.001 | -8.260 | .000 |
| DAK | 1.000 | .000 | .997 | 9557.533 | .000 |

Berdasarkan table diatas diperoleh uji parsial (uji t) maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengaruh PAD terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah

Dari hasil uji t pada tabel diatas, menunjukkan bahwa PAD memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 dengan nilai t hitung 121,672. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari tingkat kesalahan yang dapat diterima yaitu 0,05 atau ($0,000 < 0,05$) yang menunjukkan bahwa variabel PAD berpengaruh positif terhadap TKKD. Dengan demikian dalam penelitian ini, H1 yang menyatakan PAD berpengaruh terhadap TKKD diterima.

2. Pengaruh DAU terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah

Dari hasil uji t pada tabel diatas, menunjukkan bahwa DAU memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 dengan nilai t hitung -8,260. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari tingkat kesalahan yang dapat diterima yaitu 0,05 atau ($0,000 < 0,05$) yang menunjukkan bahwa variabel DAU berpengaruh positif terhadap TKKD. Dengan demikian dalam

penelitian ini, H1 yang menyatakan DAK berpengaruh terhadap TKKD diterima.

3. Pengaruh DAK terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah

Dari hasil uji t pada tabel diatas menunjukkan bahwa DAK memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 dengan nilai t hitung 9557,533. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari tingkat kesalahan yang dapat diterima yaitu 0,05 atau ($0,000 < 0,05$) yang menunjukkan bahwa variabel DAK berpengaruh positif terhadap TKKD. Dengan demikian dalam penelitian ini, H1 yang menyatakan DAK berpengaruh terhadap TKKD diterima.

Uji Stimulan

ANOVA^a

| Model | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|--------------|----------------|----|-------------|---------------|-------------------|
| 1 Regression | 1283591.949 | 3 | 427863.983 | 108632973.394 | .000 ^b |
| Residual | .299 | 76 | .004 | | |
| Total | 1283592.249 | 79 | | | |

a. Dependent Variable: TKKD

b. Predictors: (Constant), DAK, PAD, DAU

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 108632973,4 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari tingkat kesalahan yang dapat diterima yaitu 0,05 atau ($0,000 < 0,05$) yang menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini dapat memenuhi kriteria uji kelayakan, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen yaitu pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu tingkat kemandirian keuangan daerah.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary^b

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|--------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | 1.000 ^a | 1.000 | 1.000 | .06276 |

a. Predictors: (Constant), DAK, PAD, DAU

b. Dependent Variable: TKKD

Dari tabel diatas dapat dilihat nilai koefisien determinasi (R²) adalah 1,000. Nilai ini mempunyai arti bahwa variabel independen secara bersama sama memberikan sumbangan sebesar 100% dalam mempengaruhi variabel dependen yaitu tingkat kemandirian keuangan daerah. Dan dapat disimpulkan besarnya pengaruh variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah sebesar 1,000 (100%)

E. PENUTUP

Simpulan

Dari uraian hasil analisis serta pembahasan diatas, terdapat beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Hasil penelitian secara stimultan menunjukkan bahwa PAD, DAU, dan DAK secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah (TKKD)
2. Hasil penelitian secara partial menunjukkan bahwa:
 - a. PAD berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah (TKKD).
 - b. DAK berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah (TKKD).
 - c. DAU berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah (TKKD).

Saran

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tolak ukur dan tambahan referensi dalam penelitian berikutnya dengan menambah periode penelitian, variabel penelitian, objek penelitian lain, misalnya seluruh Indonesia.

Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, hasil penelitian ini diharapkan dapat memaksimalkan dan meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga dapat meningkatkan tingkat kemandirian keuangan daerah. Dengan demikian dana alokasi umum yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat akan berkurang, karena daerah dapat memenuhi kebutuhan operasionalnya dengan menggunakan pendapatan asli daerahnya, sehingga tingkat kemandirian keuangan di pemerintah daerah akan meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Almaherani, Riaki (2021) Pengelolaan Sumber Pendapatan Asli Desa Mattirowalie Kecamatan Libureng Kabupaten Bone
- An dhini, S. V. (2014). Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daeah, Tax Effort dan Alokasi Belanja Modal di Jawa Timur
- Ayem, Sri. & Pratama, D. D. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2011-2016.
- Danius, R. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020
- Ersyad (2011). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Sumatra Barat)
- Ervina Anwar et al (2014). Analisis Kemandirian Fiskal Tahun 2011-2012 daerah kabupaten/kota provinsi Sulawesi utara
- Fauziah, Ifat. (2018). Buku Standar Akuntansi Pemerintah. Tangerang: Ilmu

Media.

- Fidayanti, F. dan Hidayat M. T. (2019) Pengaruh Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kota Surabaya (Studi Kasus Periode 2011-2017). *Jurnal Ekonomi Akuntansi*
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 23*. Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
- Huda, S. (2019). Pengaruh PAD, DAU, dan DAK Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah 2014-2016
- Jayanti, F. D. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2018